

# DAFTAR ISI

1. *Public Private Community Partnership* dalam Pembangunan Terminal Transit Paso Kota Ambon  
**MIKE J. ROLOBESSY** \_\_\_\_\_ **1-15**
2. Peran Komunikasi dan Penggunaan Media Massa pada Kelompok Peternak Sapi di kabupaten Maluku Tenggara  
**VRANSISCA KISSYA** \_\_\_\_\_ **16-30**
3. Rezin Politik dan Problem Pembangunan di Indonesia  
**NURAINY LATUCONSINA** \_\_\_\_\_ **31-41**
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah  
**ISRA MUKSIN** \_\_\_\_\_ **42-50**
5. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah  
**YUDI DE FRETES** \_\_\_\_\_ **51-60**
6. “Perilaku Masyarakat Terhadap Budaya Hidup Bersih” (Studi Kasus Pada Masyarakat Negeri Batu Merah Kampung RT 03 / RW 03Kecamatan Sirimau Kota Ambon).  
**BAHRUDIN HASAN** \_\_\_\_\_ **61-70**
7. Program Jamkesmas di Puskesmas Tomalehu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)  
**ILYAS IBRAHIM** \_\_\_\_\_ **71-80**
8. Penegakan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik yang Berkualitas Di Kantor Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
**HEIN EDUARD SIMATAUW** \_\_\_\_\_ **81-90**
9. Efektifitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2dtk) Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah  
**SITI GAIF NINGKEULA** \_\_\_\_\_ **91-106**
10. Analisa Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Pulau Pulau Kur Kota Tual  
**LUSIA RENTANUBUN** \_\_\_\_\_ **107-139**
11. Peran Institusi Lokal dalam Mencegah Konflik Sosial antar Komunitas Islam dan Kristen di Desa Waihatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat  
**ISHAKA LALIHUN** \_\_\_\_\_ **140-166**

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Oleh :  
ISRA MUKSIN\*

Abstrak

Dewasa ini perbincangan tentang otonomi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih harus berlangsung dan mendapat perhatian yang serius. Salah satu segi yang menjadi perhatian utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pada pasal ayat 1 UU Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Maksudnya yaitu sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya adalah melalui pendapatan asli daerah (PAD), maka daerah berhak mengadakan kewenangan dalam hubungan dengan memperoleh penerimaan bagi pembangunan daerah khususnya melalui penerimaan dari pendapatan asli daerah tersebut, dimana pajak daerah dan retribusi daerah ada di dalamnya.

Kata Kunci: Pengelolaan, PAD

#### A. Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, maka permasalahan yang terutama adalah ketersediaan dana yang memadai, karena segala proses pembangunan yang akan dilakukan memerlukan pembiayaan. Untuk itu daerah oleh Undang-undang ini diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan di daerah yang bersangkutan.

Hal ini sebagaimana di uraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya pada point 6 tentang Keuangan Daerah bahwa

---

\* Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Bumi Hijrah, Tidore

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan daerah yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang di sahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan sumber perimbangan lainnya.

Karena itu dalam rangka perimbangan Keuangan Antara Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintah daerah di dukung dengan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah dijelaskan lebih lanjut oleh Riwu Kaho (1988 : 252) menjelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat akan tercapai bila sumber utama keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu instansi pelaksana di bidang pengelolaan pendapatan dan asset daerah memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama pemasukan yang berasal dari PAD. Selain itu, dinas ini bertugas sebagai koordinator pengelolaan pendapatan dan asset daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas

Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah, dikatakan demikian karena pemberian kewenangan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah kepada Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan serta optimalisasi capaian PAD khususnya yang berasal dari retribusi daerah.

## B. Pembahasan

Dalam upaya memecahkan permasalahan kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka dimensi teoritis yang merupakan titik tolak berfikir yang dapat memberikan fondasi dan pedoman yang bersifat teoritis seharusnya diuraikan terdahulu. Terkadang Aplikasi dilapangan suka berbeda antara aspek teoritis dengan praktek yang sangat dipengaruhi dengan keadaan. Namun apabila dalam praktek tersebut memiliki landasan teori yang kuat dapat membawa keteraturan, kesederhanaan dan mekanisme yang jelas dalam mencapai tujuan. Untuk itu landasan teori yang ada relevannya dengan masalah merupakan hal yang pokok untuk mempertemukan jalan terbaik dalam memecahkan masalah sebuah penelitian ilmiah.

Untuk itu, dalam bab ini penulis akan menguraikan secara teoritis pendapat para ahli yang dinilai erat kaitannya dengan masalah kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, sebelum diuraikan secara terperinci faktor-faktor tersebut, kiranya perlu digambarkan bahwa dalam

kaitannya dengan penelitian ini, penulis berlandaskan pemikiran pada pendapat Lewless (dalam Niga, 1999 : 15) yang menyebutkan bahwa dalam satu penelitian tidaklah perlu mencari keseluruhan hubungan variabel yang ada. Sedangkan menurut penulis, berbagai variabel dalam hasil penelitian yang disebutkan dapat dikategorikan atas variabel yang pengaruhnya bersifat langsung dan variabel yang pengaruhnya tidak bersifat langsung terhadap factor-faktor yang searah atau dapat dinilai sebagai factor yang mempengaruhi kemampuan Aparatur dalam pengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengandung konsekuensi perlunya aparatur/birokrasi yang kuat sehingga keberadaan aparatur pemerintah daerah diharapkan akan mampu memainkan peran sebagai pemikir, perencana, pelaksana sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang merupakan fungsi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui factor manakah yang paling dominan dari faktor koordinasi, faktor motivasi seorang dan faktor penempatan pegawai Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam mengelola pendapatan asli daerah.

Kiranya perlu diakui bahwa membaiknya persepsi masyarakat terhadap suatu objek tertentu termasuk halnya pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah ataupun terkait dengan kemampuan aparatur Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset daerah, kiranya dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel. Namun, dengan bersandarkan pemikiran pada pendapat Lawless dalam Niga (1999, 31) menyatakan bahwa dalam suatu penelitian tidaklah perlu mencari

keseluruhan hubungan variabel yang ada. Maka dalam penelitian ini permasalahan pokok yang penulis rumuskan yaitu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Kemampuan Aparatur dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah? kemudian diukur melalui beberapa indikator yang penulis nilai ada relevansinya.

Faktor ini selanjutnya diukur dengan menggunakan indikator-indikator, antara lain;

- a. Terencananya rapat kerja secara intensif
- b. Terlaksananya rapat kerja antara pimpinan dan bawahan sesuai rencana
- c. Pelaksanaan pekerjaan sesuai pedoman kerja yang tersedia
- d. Terbina kerja sama yang harmonis antara unit kerja

Koordinasi memiliki peranan yang penting di dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Pengertian koordinasi secara umum mengandung arti bahwa dalam setiap tindakan adanya saling hubungan dan keterkaitan antara satu sama lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Soewarno Handyaningrat (1982 : 117) bahwa koordinasi sebagai usaha menyatakan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi merupakan suatu kesatuan yang bulat, guna melancarkan atau melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Selain itu, koordinasi menurut Sugandha (1987 : 12) adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dari unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsinya agar secara nyata benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian tujuan dengan efisien.

Pentingnya koordinasi disini dijelaskan oleh Soewarno Handayani (1982 : 119) sebagai berikut :

- 1) Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi tersebut.
- 2) Koordinasi mempunyai efek terhadap moral dari organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peraturan kepemimpinan.
- 3) Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan dari personal di dalam organisasi.

Sebaliknya suatu organisasi yang melakukan pembagian kerja tanpa koordinasi akan berakibat masing-masing bagian atau unit berjalan sendiri tanpa adanya kesatuan arah dan keadaan ini jika dibiarkan berlangsung terus menerus dapat menyebabkan tujuan tidak akan tercapai. Sedangkan menurut Nanik Suwanti (2002) koordinasi dapat dikonsepsikan sebagai proses penyatupaduan gerak dari seluruh potensi, dari unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang tugas dan fungsinya berbeda dalam rangka menciptakan suatu kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan terkait dengan menjawab permasalahan pokok maka berikut ini akan disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mayoritas responden menjawab bahwa dalam pelaksanaan tugas faktor koordinasi antar unit-unit kerja terkait berada pada posisi kurang. Hal ini nampak pada jawaban mayoritas responden terhadap sub-sub indikator

berada pada posisi sedang, artinya : Sekalipun rapat kerja antar pimpinan yang ada selalu melaksanakan rapat pimpinan sesuai rencana yang ada, namun disisi lain, terkadang rapat kerja antar pimpinan yang ada kurang terlaksana secara intensif dan belum ditindak lanjuti hasil rapat tersebut kepada pimpinan pada level menengah kebawah dan secara rutin dapat dilaksanakan sesuai yang disepakati sebelumnya, Hal ini berimplikasi pada rurang terjalinya kerjasama yang harmonis antara berbagai satuan kerja maupun dengan petugas pengelola pungutan di lapangan.

- b. Terkait dengan mayoritas responden memberikan jawaban mereka tentang faktor motivasi masih berada pada kategori kurang. Hal ini nampak pada jawaban mayoritas responden terhadap beberapa sub indikator seperti, pimpinan jarang memberikan pujian kepada para pegawai yang berhasil melaksanakan tugas mereka. Masalah ini berpengaruh pada jarang nya perhatian pimpinan untuk memberikan penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi.

## 2. Saran

Didasarkan pemikiran pada hasil penelitian dan kesimpulannya, maka dapat disarankan antara lain :

- a. Perlu perbaikan terhadap metode kerja pungutan yang terkesan tidak efisien seperti penugasan langsung, selambat-lambatnya dapat diterapkan tahun depan dengan tentunya mempertimbangkan jumlah potensi pungutan yang tersedia sehingga terhindari jumlah pendapatan lebih rendah dari penerimaan sebagai akibat penugasan langsung.

- b. Peningkatan kemampuan aparat Dispenda dalam pelaksanaan tugas harus mendapat perhatian yang lebih serius, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- c. Perlu pemberian wewenang yang lebih besar kepada Dispenda seperti pemberian kewenangan dalam menerapkan sanksi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang secara sengaja dan tidak sengaja terlambat dalam membayar kewajibannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Admihardjo, Kusnaka, 2001, Kumpulan Materi Kebijakan Publi, STIA LAN RI, Bandung.
- Alex Nitisemito, Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar, Galia Indonesia 1985
- Gunarsa, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1986.
- Gasfer, 1988. Organisasi Yang Dinamis, Ohalia Indonesia, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Handoko, T, Hani. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, BPFE, 1992
- Hasibuan, 1994, Organisasi dan Motivasi Manajemen, Cetakan 1, Bumi Aksara, Jakarta.
- H. Abdulrahman, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991
- Jaya. W.K., 1996. Ilmu Keuangan Negara, Perdjo, Jakarta.
- Josef Riwo Kaho, 1988. Prospek Otonomi Daerah di negara RI, Rajawali Press, Jakarta..
- Kaho. J. Riwo, 1997. Analisa Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah, Bina Indria, Yogyakarta.
- Niga S. Jakoba, 1999. Analisis Kinerja : Panduan Praktis Untuk Menganalisis Kinerja Organisasi, Kinerja Proses Dan Kinerja Pegawai. Lembaga Administrasi, Jakarta
- Putra Takesih, 1998. Manajemen Organisasi, Karya Pemuda, Jakarta.
- Pamudji S., Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Saputra, 2003. Aspek-Aspek Pengembangan Organisasi, Karya Pemuda, Jakarta.
- Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Grafiti, Jakarta,
- Sarwoto, 1981. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajeen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Seri Kajian Fisikal dan Moneter Edisi Khusus, 1996. Pajak Kunci Kemandirian, LP3NI, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 1988, Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Sugandha, Dana, 1989, Pengantar Administrasi Negara, Intermedia, Jakarta.

- Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Gajagmada Univercity, press Cetakan ke delapan 1980
- Suwarti, Nanik, 2002. Efektivitas Pelayanan UPTSA Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima, Jurusan Administrasi Negara, UGM.
- Tjokroawinoto, 1996, Pembangunan Negara Berkembang, Teori dan Aplikasinya, Gajah Mada Press, Yokyakarta
- Thoha, Miftah, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Penerbiat CV. Rajawali, Jakarta, 1988.
- Thoha, Miftah. 1990. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, BPFE.
- Winarno, Infrastruktur dan Mekanisme Partisipasi, Pembinaan Partisipasi Sosial, Jakarta, Departemen Sosial RI. 1986.